

PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN YANG MEMBEBAKAN: SUATU KAJIAN HISTORIS PAK DI INDONESIA

Desi Sianipar

Universitas Kristen Indonesia
Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen
desi.sianipar07@gmail.com

Abstrak

Pendidikan apapun seharusnya bersifat membebaskan sesuai dengan muatan makna yang terkandung di dalam istilah pendidikan. Terutama sekali, sifat membebaskan ini dirasakan sangat kuat pada pendidikan agama Kristen, baik PAK sebagai disiplin ilmu atau salah satu mata kuliah/pelajaran di sekolah dan universitas, maupun PAK sebagai aktivitas pendidikan dalam kehidupan orang Kristen di gereja, keluarga dan masyarakat. Pembebasan yang dimaksud adalah membawa naradidik keluar dari kebodohan, kelemahan, kemiskinan, dan berbagai penindasan.

Makalah ini memuat kajian historis PAK di Indonesia, khususnya di lingkungan Protestan sejak masa VOC hingga masa kini untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pendidikan agama Kristen sudah membawa pembebasan bagi para naradidiknya. Dengan belajar dari sejarah PAK di Indonesia, kita bisa melakukan penilaian dan koreksi atas pendidikan agama Kristen yang saat ini kita laksanakan demi memajukan para naradidik, khususnya di era MEA ini.

Makalah ini berusaha mendeskripsikan upaya-upaya pendidikan agama Kristen ketika dimulai, dilaksanakan, dan dikembangkan; dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PAK di Indonesia. Dengan demikian, dari pembahasan ini diharapkan dapat memperlihatkan kekuatan dan kelemahan kita, khususnya dalam mempersiapkan naradidik menghadapi persaingan-persaingan yang kuat pada masa ini.

Tulisan ini disusun dari studi literatur yang memuat sejarah PAK di Indonesia, observasi, dan percakapan lisan dengan berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan PAK di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan, Pendidikan Agama Kristen, Sejarah, Pembebasan

Pendahuluan

Pendidikan apa pun semestinya bersifat membebaskan atau memerdekakan setiap naradidik dari kebodohan, kelemahan, kemiskinan, dan penindasan. Menurut KBBI, membebaskan artinya *melepaskan dari (ikatan, tuntutan, tekanan, hukuman, kekuasaan, dan sebagainya); memberi keleluasaan untuk bergerak (berkata, berbuat, dan sebagainya); melepaskan dari (kekuasaan,*

asing); memerdekakan; memberhentikan (dari tugas dan jabatan) karena berbuat kesalahan. Frasa “pendidikan agama Kristen” sendiri sudah memperlihatkan penekanan pada pembebasan. Jika dikaji lebih dalam, istilah pendidikan berasal dari dua kata Latin *educare* dan *educere*, yang menunjukkan bahwa *educare* berarti “merawat, memperlengkapi dengan gizi, agar sehat dan kuat”, sedangkan *educere* artinya “membimbing keluar dari”

Dengan pengertian ini, pendidikan dapat dipahami sebagai upaya sadar untuk memperlengkapi seseorang atau sekelompok orang, dan untuk membimbingnya keluar dari satu tahapan hidup ke tahapan lainnya yang lebih baik.¹ Selanjutnya, agama dipahami sebagai satu jenis sistem sosial yang dibuat oleh para penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan non empiris, yang dipercayai dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas. Agama diharapkan sebagai sistem yang membebaskan para penganutnya dari masalah-masalah yang kerap dihadapi, yakni: ketidakpastian, ketidakberdayaan, kelangkaan, penderitaan, dan kematian.² Pendefinisian frasa “pendidikan agama Kristen” telah menunjukkan sifatnya yang begitu kuat untuk membebaskan para pembelajar PAK.

Bertolak belakang dengan sifat PAK yang membebaskan, kita malah kerap menemukan pendidikan agama Kristen yang justru membelenggu, menindas dan tidak mencerahkan para naradidiknya sehingga mereka tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan.

1. Arti dan Tujuan Pendidikan Agama Kristen

Secara umum, pendidikan terdiri dari tiga jenis, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan pendidikan informal. Menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang mencakup pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan jenis ini dapat diadakan oleh lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Sementara itu, pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri di mana hasilnya dapat diakui pemerintah sebagai setara dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan

¹ B. Samuel Sidjabat, *Strategi Pendidikan Kristen* (Yogyakarta: Yayasan ANDI, cet. ke-7, 1999), 8.

² Hendropuspito, D.C., *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 2006, cet. ke-22), 29-35.

standar nasional pendidikan.³ Pembahasan pendidikan agama Kristen dalam kaitan keduanya karena pelaksanaan pendidikan agama Kristen secara formal tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus ditopang oleh pendidikan agama Kristen yang dijalankan secara nonformal dan informal di dalam gereja dan masyarakat.

Pemerintah Indonesia melalui UU Sisdiknas tahun 2003 mendefinisikan pendidikan agama sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.⁴ Dijabarkan pula tujuan dari standar isi pendidikan agama, termasuk di dalamnya pendidikan agama Kristen, yaitu:

- memperdalam dan memperluas pengetahuan dan wawasan keberagaman peserta didik.
- mendorong peserta didik agar taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.
- menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara.

- membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, ikhlas, dan bertanggung jawab.
- mewujudkan kerukunan antar umat beragama.⁵

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pendidikan agama Kristen mengutamakan pembangunan karakter atau akhlak yang mulia pada peserta didik sehingga mereka bisa memberikan kontribusi positif dan maksimal bagi masyarakat luas.

2. Pendidikan Agama Kristen yang Membebaskan

Dalam dunia pendidikan, ide tentang pembebasan atau membebaskan telah diinspirasi oleh teologi pembebasan dari Amerika Latin dan pendidikan yang membebaskan dari Paulo Freire. Teologi pembebasan pada awalnya dimulai dan berkembang di Amerika Latin pada tahun 1968 yang dipelopori oleh para teolog Katolik Amerika Latin. Kemunculan teologi ini dimotivasi oleh sejumlah upaya pembaruan sosial, ekonomi, dan budaya sejak tahun 1960, saat di mana istilah

³ UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab IV pasal 13-32.

⁴ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Bab I Pasal 1 ayat 1.

⁵ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Bab II Pasal 6.

“*liberation*” (pembebasan) muncul dalam teologi Amerika Latin. Pada intinya, teologi ini memperjuangkan pembebasan rakyat Amerika Latin dari berbagai tindakan eksploitatif dari lembaga-lembaga nasional dan internasional melalui upaya-upaya transformasi radikal dalam bidang sosial dan ekonomi. Mereka mengkritisi identitas dan situasi yang mereka hadapi saat itu, yaitu berada dalam sistem oligarkhi, kapitalisme, kekerasan. Dengan itu, mereka berharap mampu menyingkapkan penyebab terjadinya: marginalitas sosial, kemiskinan, kebergantungan, dan kekerasan yang dialami oleh kaum mayoritas (rakyat). Penggunaan “*liberation*” ini kemudian meluas ke dalam pendidikan dengan menggunakan pemikiran Paulo Freire dari bukunya *Pedagogy of the Oppressed* untuk menekankan fungsi pendidikan yang membebaskan.⁶

Pendidikan yang membebaskan dipikirkan oleh Paulo Freire, sebagai pendidikan yang dijalankan berdasarkan teori kesadaran kritis dan metode dialog. Teorinya disusunnya dalam bukunya yang berjudul *Conscientization*. Dia memahami pendidikan sebagai bagian dari transformasi masyarakat yang revolusioner, yang dimotivasi oleh konteks

masyarakat Brazil tahun 1960 di mana separuh dari populasi di sana hidup dalam budaya diam” (*culture of silence*). Mereka buta huruf dan apatis, tertindas, dan fatalis. Freire berharap metodenya akan melenyapkan keadaan-keadaan itu dengan menekankan pentingnya setiap orang memiliki kesadaran kritis sehingga orang-orang Brazil dapat berperan sebagai subjek dalam situasinya (realitas sosial) dan mengetahui apa yang diperlukan untuk berubah. Kesadaran kritis adalah proses kesadaran yang berkembang dan memiliki kekuatan untuk mentransformasi realitas. Untuk mencapai kesadaran kritis tersebut, sarana yang digunakan adalah dialog yang aktif dan pedagogi yang kritis yang mengubah isi pelajaran sehingga itu berasal dari pengalaman-pengalaman dan realitas sosial yang konkrit dan kemudian melakukan pemetaan masalah. Karena itu, analisis kritis dan kreativitas akan melemahkan perilaku belajar yang pasif. Metode Freire ini juga tampak dalam hubungan dialogis dan dialektis antara pendidik dan naradidik yang menciptakan aktivitas dan sikap belajar bersama.⁷

⁶ James C. Livingston & Francis Schüssler Fiorenza, *Modern Christian Thought: The Twentieth Century Volum 2* (Minneapolis: Fortress Press, 2006), 288-289.

⁷ Paulo Freire adalah seorang edukator dan filsuf yang lahir di Brazil 19 September 1921. Dia dikenal dengan metode membaca dan menulis yang didasarkan pada kesadaran kritis dan dialog. Idennya memberikan kontribusi yang sangat penting bagi dunia pendidikan, misalnya: teori kesadaran diri dan dialog, pendidikan yang membebaskan, kritik terhadap pendidikan “*banking*”, dan kritik terhadap konsep perluasan sebagai invasi budaya (Juma E. Nyirenda, *The Relevance of Paulo*

Demikian pula, tulisan ini diinspirasi oleh keduanya dan menghubungkannya ke dunia pendidikan agama Kristen karena penulis berharap pendidikan agama Kristen dapat memberi pengaruh yang besar bagi penyelamatan masyarakat Indonesia, khususnya generasi anak-anak hingga pemuda. Terutama, saat ini kita berada di tengah keprihatinan sosial dalam menyikapi berbagai kasus pemerkosaan yang marak di Indonesia; penggunaan narkoba yang makin meluas dan hampir menjadi bagian dari gaya hidup anak muda saat ini; pergaulan bebas di kalangan remaja dan pemuda; serta perilaku kasar di kalangan kaum muda (*bullying*), belum lagi ditambah dengan merosotnya keteladanan yang diberikan oleh orang-orang dewasa. Sementara itu, persaingan yang semakin tinggi di era MEA ini sangat menuntut kecerdasan berpikir, kecerdasan karakter, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual dari para pemuda yang siap memasuki dunia kerja. Pendidikan agama Kristen sebagai aktivitas yang terus berlangsung di dalam gereja dan penyelenggaraan pendidikan agama Kristen di sekolah dasar hingga perguruan tinggi seharusnya memperkuat dan memaksimalkan fungsinya untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang

melanda masyarakat kita. Karena itu, pemikiran tentang pendidikan agama Kristen yang membebaskan bisa menjadi pendorong bagi kita dalam memajukan masyarakat melalui pendidikan terhadap naradidik kita.

Banyak kelemahan yang dijumpai dalam dunia pendidikan agama Kristen sehingga membuat pendidikan itu tidak bisa menjalankan fungsinya yang bersifat membebaskan, atau sebaliknya malah membebani peserta didik dengan hal yang tidak seharusnya. Pemikiran ini penting untuk dibangkitkan kembali karena pendidikan agama sekarang masih cenderung indoktrinatif. Selain itu, penulis mengamati kelemahan-kelemahan dalam dunia pendidikan agama Kristen, antara lain: a) tidak memiliki visi dan misi yang jelas dalam penyelenggaraan PAK, baik di gereja, sekolah, keluarga, dan masyarakat; b) kurangnya pemahaman yang utuh mengenai apa yang dimaksud dengan PAK; c) kurangnya para desainer kurikulum dan desainer program-program PAK di semua wilayah PAK, bahkan banyak pemimpin gereja dan sekolah yang asing dengan kurikulum PAK; d) kurangnya tenaga pendidik PAK yang berkualitas; e) minimnya biaya atau dana yang dialokasikan untuk pengembangan PAK di semua wilayah PAK; f) kurangnya sarana pendidikan yang mendukung kurikulum; g) kurangnya manajer terampil

dan berkualitas untuk mengembangkan PAK di lembaga-lembaga yang menyelenggarakan PAK; pembelajaran PAK banyak dilakukan dengan pendekatan indoktrinasi.

Adalah penting untuk belajar dari sejarah untuk melihat seberapa jauh para pengelola PAK di Indonesia melakukan pengembangan pendidikan agama Kristen yang membebaskan sebagaimana yang dimaksud di atas.

3. Suatu Kajian Historis PAK di Indonesia

Pelaksanaan pendidikan agama Kristen dalam sejarah Kekristenan di Indonesia telah dimulai sejak Portugis masuk ke Indonesia dengan dua misinya, yakni untuk perluasan agama dan perluasan monopoli perdagangan. Akan tetapi dalam kajian ini, penulis berfokus pada pelaksanaan pendidikan agama Kristen Protestan yang dimulai dengan masuknya VOC ke Indonesia pada awal abad ke-17.

a. Pendidikan Agama Kristen pada masa VOC

Ketika VOC memasuki Indonesia pada awal abad ke-17, motivasi mereka tidak berbeda dengan motivasi Portugis, yaitu berusaha untuk memonopoli perdagangan di Indonesia, khususnya perdagangan rempah-rempah di Indonesia

bagian Timur yang memikat hati bangsa-bangsa Eropa. Karena itu, setelah VOC menaklukkan Portugis dan merebut daerah jajahannya, maka para penganut agama Katolik hasil dari pekerjaan para misionaris Katolik dengan segera beralih menjadi penganut agama Protestan, baik dengan kemauan sendiri maupun karena pemaksaan/kekerasan yang dilakukan VOC.

Pada masa VOC, pendidikan agama Kristen terjalin erat dengan kegiatan pekabaran Injil dan pendirian gereja-gereja yang dilakukan oleh pendeta-pendeta yang diangkat VOC. Menurut Kroeskamp dalam bukunya *Early Schoolmaster in a Developing Country*, VOC sangat memberi perhatian yang besar pada masalah pendidikan di Indonesia sesuai dengan instruksi Gubernur Jenderal dan *the Council of the East India* tahun 1617. Pada waktu itu, gereja dan sekolah terhubung erat karena sekolah-sekolah dipandang sebagai tempat yang tepat untuk penanaman agama. Selain itu, sekolah juga dipandang sebagai alat untuk menyatukan masyarakat dengan VOC. Dengan demikian, kebijakan pendidikan merupakan percampuran antara dua kepentingan, yaitu kepentingan agama dan kepentingan ekonomi politik.⁸

⁸ H. Kroeskamp, *Early Schoolmasters in a Developing Country: A History of Experiments in School Education in 19th Century Indonesia*

Tenaga pendidik sangat kurang karena pekerjaan pendidikan agama Kristen pada masa itu dilakukan oleh gereja yang dipimpin oleh pendeta-pendeta Belanda yang jumlahnya sangat terbatas. Untuk mengatasi kekurangan tenaga pelayan ini, maka diangkat guru-guru yang bekerja rangkap, yakni mengurus gereja dan sekolah. Meskipun sudah ada guru-guru, namun pada abad ke-17 dan 18, tidak ada pendidikan dan sekolah teologi formal untuk guru-guru Kristen pribumi. Semua pendeta Belanda yang diutus ke Indonesia dipersiapkan di *Seminarium Indicum* yang didirikan di Leiden antara tahun 1622-1632.⁹ Guru-guru tersebut juga hanya bersifat membantu karena mereka hanya mengajarkan apa yang sudah ditentukan untuk mereka ajarkan di sekolah atau di gereja. Mereka sama sekali tidak boleh membuat materi ajar sendiri.

Kroeskamp menceritakan bahwa memang VOC juga sudah menunjukkan upaya yang serius untuk menata persekolahan, termasuk pembelajaran PAK dengan mempersiapkan berbagai aspek yang diperlukan, misalnya: pengorganisasian sistem pendidikan, bahasa pengantar pembelajaran, guru-guru,

murid-murid, rancangan pedagogik (kurikulum, metode, jadwal sekolah, dan sarana pendidikan), pengawasan, dan kerjasama antar sekolah. Akan tetapi persiapan itu tampaknya sangat dipengaruhi oleh ideologi Barat yang merasa superior terhadap orang-orang jajahannya. Pengorganisasian sistem pendidikan pada masa itu sangat berorientasi pada gereja yang kemudian akan mewujudkan programnya melalui bantuan sekolah. Sekolah juga dipandang sebagai alat kekuasaan pemerintah. VOC lah yang membiayai seluruh sistem sekolah dan mengatur sekolah melalui pekerjaan para pendeta yang melaksanakan kebijakan pendidikan dan mengawasi sekolah-sekolah berdasarkan peraturan-peraturan yang dimuat dalam tata gereja. Kita melihat bahwa sekolah dibangun bukan atas kesadaran bahwa pendidikan itu pada hakikatnya diperlukan untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, dan ketertindasan. Demikian pula halnya yang terjadi pada bahasa pembelajaran, sama sekali tidak berfungsi komunikatif dan efektif untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada murid. Pada awalnya bahasa Belanda ditetapkan sebagai bahasa pembelajaran di semua sekolah, namun kemudian bahasa ini tidak berfungsi karena orang pribumi mengalami kesulitan. Sebenarnya, penggunaan bahasa

(Assen, The Netherlands: Van Gorcum & Comp. B.V., 1974), 9-10.

⁹ Jan Sihar Aritonang, *Sejarah Pendidikan Teologi di Indonesia*. Makalah Seminar tanggal 9 Nopember 2010; Th. Van den End – J. Weitjens, *Ragi Carita 2* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 64.

Belanda mengandung kebijakan politis, yakni untuk memperkuat kesetiaan kepada VOC. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dan bahasa Portugis kembali diberlakukan di sekolah-sekolah, bergantung siapa yang menggunakannya, orang Indonesia atau keturunan India. Kedua bahasa ini telah meresap di antara orang Indonesia, orang India, dan orang Belanda. Keadaan ini kemudian menimbulkan kontroversi mengenai bahasa Melayu apa yang akan digunakan. Ketika Alkitab diterjemahkan Leydekker-Van der Vorm dalam bahasa Melayu tinggi, maka akhirnya VOC menetapkan bahasa Melayu tinggi sebagai bahasa sekolah. Pada tahun 1786, VOC membuat aturan di Batavia bahwa semua pengajaran sekolah harus disampaikan dalam bahasa Belanda, namun peraturan itu hanya berlaku di dua sekolah di kota itu. Di dua sekolah lainnya, bahasa Melayu dan Portugis digunakan sebagai bahasa resmi. Pada lima sekolah dari 11 sekolah swasta, bahasa Portugis digunakan sebagai bahasa sekolah oleh para pendirinya, yakni kalangan *Mardijkers*. Akan tetapi ternyata masalah bahasa sangat mengacaukan komunikasi karena tidak cocok digunakan dalam percakapan level tinggi. Bahasa-bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa-bahasa yang kacau akibat percampuran berbagai unsur bahasa asing. Bahasa-bahasa itu menjadi tidak efektif

digunakan untuk pendidikan moral dan pendidikan spiritual. Masalah bahasa sangat digumulkan pada abad ke-19 karena para ahli pendidikan mulai menyadari bahwa bahasa adalah dasar utama untuk keefektifan pendidikan.¹⁰

Pada masa VOC, setiap guru berfungsi ganda, yaitu mengajar di sekolah dan menggantikan tugas pengkhotbah, penghibur orang sakit, dan pendeta jemaat, di mana mereka melayankan ibadah pada setiap hari Minggu, mengadakan kelas-kelas katekisasi, dan berbagai tanggungjawab gereja lainnya. Meski demikian, pada praktiknya, tidak satu pun dari mereka yang menerima pendidikan profesional menyangkut tugas ganda ini. Sebelum mereka masuk dalam pendidikan guru, mereka biasanya menerima pelatihan tambahan di rumah pendeta atau kadang-kadang menerimanya dari pejabat pemerintah, misalnya: menyanyikan mazmur-mazmur, pendidikan agama, dan membaca. Hasil pendidikan sekolah sangat bergantung pada kecerdasan dan karakter guru. Tugas guru telah dimuat dalam *General Church Order* tahun 1643 bahwa seorang guru bertugas: *pertama*, untuk menanamkan rasa takut akan Tuhan kepada kaum muda; mengajarkan prinsip-prinsip utama agama Kristen; mengajar mereka berdoa, menyanyi, mengarahkan

¹⁰ Kroeskamp, *Op.Cit.*, 9-12.

ke gereja, dan memberi pendidikan agama kepada mereka. *Kedua*, mengajar kaum muda untuk menaati orangtua, para penguasa, dan guru-guru. *Ketiga*, mengajar mereka membaca dan menulis, aritmatika. *Keempat*, mengajar mereka moral dan perilaku yang baik, dan akhirnya, memastikan bahwa bahasa Belanda adalah bahasa yang digunakan di sekolah-sekolah. Di dalam Peraturan Sekolah (*the School Regulations*) tahun 1684 dinyatakan bahwa syarat-syarat sebagai guru adalah dia harus mengakui agama *Reformed*, harus membaca semua buku cetak dan dokumen tertulis, menulis dengan baik, menyanyikan mazmur-mazmur Daud dengan bagus, pandai dalam Aritmatika. Di Maluku, syarat-syarat ini tidak dijalankan semuanya dengan serius karena Aritmatika tidak diajarkan di sana. Guru-guru pada masa itu bekerja dengan penuh pengabdian karena pendapatan mereka yang sangat kecil. Di Batavia, guru boleh menerima hadiah sukarela dari para orangtua, kecuali dari orang-orang miskin dan budak-budak, bahkan anak-anak mereka harus diberikan pengajaran secara gratis.¹¹

Pendidikan (umum dan agama) diberikan hanya kepada murid-murid yang merupakan anak-anak dari orangtua Kristen, baik orang Belanda maupun non

Belanda. Orang-orang non Kristen tidak dilarang, tetapi kadang-kadang mereka didorong untuk mengikuti pendidikan, meskipun sejak tahun 1780 kalangan Kristen dan non Kristen dipisahkan. Pada masa itu banyak sekolah swasta yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan para pegawai VOC yang berkebangsaan Belanda karena mereka tidak ingin anak-anak mereka dicampur dengan anak-anak miskin atau anak-anak budak yang berada di sekolah milik VOC. Kalangan *Mardijker* juga melakukan hal yang sama. Karena itu, pada tahun 1674 di Batavia terdapat 18 sekolah swasta, 6 yang dijalankan oleh orang-orang Belanda, dan 12 oleh kalangan *Mardijker*.¹² Uraian di atas memperlihatkan bagaimana pola pikir yang diskriminatif telah membentuk persekolahan yang diskriminatif pula, baik di lingkungan pendidikan umum maupun di lingkungan pendidikan agama Kristen.

Rancangan pedagogik sangat menekankan pendidikan agama, walaupun tetap memiliki kepentingan sosial. Di sekolah-sekolah VOC di Batavia, kurikulum memuat Aritmatika sebab Batavia adalah pusat perdagangan, sedangkan di pulau-pulau bagian Timur yang penduduknya hidup secara agraris, Aritmatika tidak diajarkan. Ada pula upaya untuk memberikan pelajaran tambahan di

¹¹ *Ibid.*, 13-15.

¹² *Ibid.*, 15-16.

luar sekolah untuk menutupi kekurangan dalam pendidikan dengan belajar privat pada seorang guru pada waktu sore. Ada lima aspek yang dimuat dalam rancangan pedagogik ini, yaitu: kurikulum, metode, jadwal sekolah, peralatan pendidikan, dan pengawasan. Kurikulum disesuaikan dengan Peraturan Gereja tahun 1643 mengenai tugas guru, tetapi karena keadaan guru yang sangat kurang, maka kurikulum tidak bisa dibuat dengan baik. Perubahan baru terjadi pada abad ke-18 ketika di Eropa banyak orang menaruh perhatian besar pada masalah pedagogik. Pada tahun 1778, para peserta didik mulai dibagi ke dalam 3 kelas berdasarkan kemajuan yang sudah dihasilkan. Kelas tiga atau yang paling rendah dimulai dengan belajar alfabet dan mengeja; di kelas dua, guru mengajar membaca, menulis, katekismus, dan menyanyi; dan di kelas pertama, guru mengajar Aritmatika sebagai tambahan pada pelajaran-pelajaran lain. Metode belajar yang digunakan pada masa ini adalah metode menghafal, terutama dalam pelajaran bahasa-bahasa sekolah (Melayu, Portugis, dan Belanda). Sampai pertengahan abad ke-19, semua pelajaran diberikan tanpa menggunakan metode berpikir dengan baik, tetapi hanya menggunakan metode mengajar tradisional di mana pelajaran diturunkan dari satu guru kepada guru yang lain. Mengenai jadwal sekolah, awalnya pelajaran

diberikan 4 jam perhari, kemudian meluas menjadi 6 jam. Hari Rabu dan Sabtu adalah hari bermain murid. Hari libur sekolah adalah pada hari-hari libur umum. Peralatan pendidikan yang dijelaskan di sini terutama buku-buku pelajaran sebab tidak ditemukan informasi menyangkut peralatan sekolah dan perlengkapan pendidikan lain, kecuali di Batavia. Buku-buku sekolah diperoleh dari Belanda berdasarkan daftar permintaan yang diajukan ke Belanda melalui kantor VOC di Batavia. Pengiriman buku-buku tersebut tidak bisa diperoleh dengan cepat karena jarak yang begitu jauh antara Amsterdam dan Batavia. Buku-buku tersebut ditulis dalam tiga bahasa: Belanda, Melayu, dan Portugis. Kadang-kadang muncul kesulitan, bila tiba-tiba bukunya menggunakan bahasa Spanyol.¹³

Pengawasan atas sekolah-sekolah pertama kali dilakukan oleh para pengkhotbah dengan mengunjungi sekolah-sekolah di distrik mereka dua kali setahun. Pengawasan di Batavia lebih baik karena pada waktu visitasi, pengkhotbah didampingi oleh seorang penatua dan seorang wakil pemerintah pusat. Pendeta biasanya memeriksa hasil pendidikan agama dengan mendengarkan murid-murid satu demi satu menyangkut katekismus, pengakuan iman, dan sebagainya. Dia

¹³ *Ibid.*, 16-21.

memperhatikan kemajuan murid dalam membaca dan menulis; dan memberhentikan studi murid-murid yang telah mencapai usia maksimum. Selain para pengkhotbah, pihak-pihak lain yang diminta untuk turut serta dalam mengawasi sekolah-sekolah adalah: para pengunjung orang sakit, para pengkhotbah awam, dan para pedagang. Ada dua keberatan yang seringkali ditunjukkan mengenai metode pengawasan, yaitu: pertama, para pejabat inspeksi tidak cukup menguasai pekerjaan itu. Para inspektur dapat menunjukkan kesalahan-kesalahan para guru sekolah, tetapi mereka tidak dapat memberikan solusinya. Di Batavia, pengawasan dilakukan oleh Majelis Gereja.¹⁴

b. Pendidikan Agama Kristen pada Masa Pemerintahan Belanda

Setelah terjadi serah terima kekuasaan politik dari VOC kepada pemerintah Belanda pada 1 Januari 1800, maka kemudian pemeliharaan gereja dan pendidikan agama Kristen menjadi tanggungjawab pemerintahan Belanda. Masuknya lembaga-lembaga zending dari Belanda, Jerman, dan Swiss ikut memperkaya upaya pendidikan agama Kristen. Seiring dengan peralihan dari VOC kepada pemerintahan Belanda, maka tenaga guru yang mengurus jemaat

semakin berkurang sehingga pengasuhan jemaat ditangani oleh guru jemaat yang berasal dari kaum awam. NZG pernah berupaya untuk membuka sekolah untuk mendidik para guru jemaat, tetapi tidak jadi. Kemudian selama parohan pertama abad ke-19 pendidikan pribumi kurang diperhatikan oleh pemerintah kolonial karena mereka lebih tertarik pada keuntungan dan perkembangan ekonomi yang mengalir ke negeri Belanda ketimbang kemajuan penduduk pribumi yang berada di bawah kekuasaan mereka. Parlemen di Belanda telah mendesak pemerintah kolonial di daerah jajahan agar mengupayakan sistem sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan sekolah yang universal.¹⁵

Pendidikan yang dibangun dari kesadaran Kristiani diungkapkan kembali melalui aktivitas para misionaris (zending). Banyak anggota gereja di Belanda mendukung pekerjaan mereka di Indonesia. Mereka menyumbangkan uang untuk kepentingan misi, dan ada pula yang menyerahkan diri menjadi misionaris dan sekaligus guru. Sebagai contoh, tahun 1840-an dan 1850-an, Roskott dan Graafland membuka sekolah guru di Ambon dan Minahasa di saat berkembang ratusan sekolah desa di wilayah-wilayah itu. Roskott dan Graafland melakukan

¹⁴ *Ibid.*, 21.

¹⁵ *Ibid.*, 9-10.

upaya-upaya yang kreatif untuk memajukan sekolah guru dengan memasukkan program pendidikan agrikultural dan seni ke dalam kurikulumnya. Selain itu, Graafland juga memajukan majalah bulanan sebagai media informasi dan pedoman berkelanjutan bagi para guru desa. Hal ini didukung oleh suasana keterbukaan dan kebebasan dalam membaca surat kabar pada masa itu.¹⁶ Di Tanawangko, Minahasa (1854-1883), Graafland menyelenggarakan sekolah calon guru sekaligus calon guru agama. Dia menyampaikan pelajaran agama atau pengetahuan Alkitab, yang kemudian nilai-nilai Kekristenan diperdalam melalui proses penyadaran. Para peserta didik diajak untuk berpikir, bertanya, mengkritik, dan mengeluarkan pendapat sendiri, tidak sekedar mencatat atau menghafal. Pendidikan juga bukan hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga di luar jam sekolah, melalui kehidupan di asrama yang disiplin, namun tidak kaku. Mereka diajar tata karma, kesehatan, dan kebersihan, serta keterampilan kerja. Bagi Graafland, iman dan agama harus menyatu dengan kehidupan sehari-hari dan seluruh tingkah laku.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, 9-10

¹⁷ Jedida T. Posumah-Santosa, Pendidikan Agama Kristen di Sekolah: Suatu Bidang Studi atau Asuhan Iman Kristen, dalam Andar Ismail (peny.), *Ajarlah Mereka Melakukan: Kumpulan Karangan*

Di kalangan Zending sendiri diadakan pendidikan para zendeling yang bertujuan mempersiapkan pekabar Injil Eropa yang mampu juga mengajar agama kepada orang-orang pribumi yang baru bertobat. Syarat paling penting dalam penerimaan calon zendeling adalah watak yang baik, iman yang sungguh-sungguh dihayati, dan panggilan untuk melakukan penginjilan, dan memiliki pengetahuan pada tingkat murid katekisasi yang mendapatkan pelajaran yang tinggi, kesehatan jasmani dan rohani, serta kuat mental dalam menghadapi berbagai tantangan dan tekanan.¹⁸

Salah satu upaya untuk menjalankan pendidikan agama Kristen di gereja dan di sekolah adalah dengan merekrut guru-guru agama melalui sekolah guru. Sekolah ini merupakan tempat pendidikan para guru yang bertugas sebagai guru sekolah dan penghantar jemaat. Mata pelajaran yang diberikan adalah Membaca (Melayu dan bahasa daerah, huruf Latin dan huruf Arab), Menulis dan Menghitung, Ilmu Bumi, Sejarah, Ilmu Alam, Ilmu Pendidikan, Menggambar, Pengetahuan Alkitab, Pokok-pokok Iman, dan Menyanyi. Masa studi di sekolah-sekolah guru pada jaman

Seputar Pendidikan Agama Kristen (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998), 154-155.

¹⁸ S.C. Graaf van Randwijck, *Oegstgeest: Kebijaksanaan Lembaga-lembaga Pekabaran Injil yang Bekerjasama 1897-1942* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), 581.

itu bervariasi, ada yang 2 tahun, 3 tahun dan 5 tahun. Pada tahun 1810-an pendidikan para pendeta pribumi (yang bertugas untuk pemeliharaan gereja, termasuk pendidikan agama Kristen) dilakukan dengan cara mereka berkumpul di sekitar para penginjil. Sesudah tahun 1867, di Indonesia bagian Timur didirikan berbagai Sekolah Pendidikan Guru Pribumi (STOVIL) di Ambon, Minahasa (didirikan tahun 1851 oleh N. Graafland di Tanawangko kemudian pindah ke Tomohon), kepulauan Sangihe Talaud dan di Timor; di Batak dibuka sekolah pendidikan penginjil atau sekolah guru agama dua tahun di Parausorat, di kemudian hari didirikan Seminari di Pansur Napitu (1883), Seminari di Narumonda (1905-1919); di pulau Jawa didirikan Seminari Depok, ada pula usaha dari Anthing untuk membuka sekolah guru tahun 1867 tetapi akhirnya bubar. Dari sekolah-sekolah tersebut yang paling ekumenis adalah Seminari Depok.¹⁹

Seminari Depok didirikan oleh J.A. Schuurman dengan dukungan P. Janz pada tahun 1878 dan bertahan dengan pola lama (mendidik para pemuda dari seluruh Indonesia menjadi guru dan pengantar jemaat) sampai tahun 1926. Lama pendidikan adalah 4 tahun dengan waktu

23 jam per minggu. Kurikulum mencakup banyak mata pelajaran umum dan mata pelajaran teologis, seperti: eksegeze, pengantar, dan dogmatika, mata pelajaran praktis, sejarah gereja, sejarah zending, sejarah agama Islam dan agama kafir. Bahasa pengantar adalah bahasa Melayu.²⁰

Seminari di Pansur Napitu berada di wilayah kerja *Zending Rheinische Mission*. Seminari dipimpin oleh P.H. Johannsen. Awalnya lama pendidikan 2 tahun, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi 4 tahun pada 1879. Menyangkut kurikulum, Johannsen memberikan semua mata pelajaran teologi. Sejak tahun 1883 seminari itu juga dilengkapi dengan kursus dua tahun untuk pendeta pribumi. Pada dasarnya, menurut J.S. Aritonang, kurikulumnya mengikuti pola di Barmen, yaitu: mata pelajaran Alkitab, tetapi kurang dalam studi Perjanjian Lama, pengetahuan katekismus, teologi praktika, apologetika, dan sejarah gereja. Dogmatika tidak ada dalam kurikulum, kemungkinan demi tujuan keterbukaan oikumenis. Pada tahun 1900, seminari itu pindah ke Sipoholon.²¹

Di Indonesia bagian Timur, beberapa *STOVIL* (di Ambon, Tomohon dan di Kupang) didirikan berdasarkan Keputusan Raja Belanda tahun 1867 yang menetapkan jabatan Pendeta Pribumi

¹⁹ A.G. Hoekema, *Berpikir Dalam Keseimbangan yang Dinamis: Sejarah lahirnya Teologi Protestan Nasional di Indonesia* (Sekitar 1860-1960), 30-34.

²⁰ *Ibid.*, 30-31.

²¹ *Ibid.*, 32-33.

(*Inlandsh leraar*). Para lulusannya bekerja sebagai pendeta pribumi di jemaat cabang dan beberapa orang dipercaya memegang resort pribumi. Gelar mereka adalah wakil pendeta yang diberi wewenang untuk melayani baptisan dan Perjamuan Kudus. Kurikulum yang diberlakukan adalah: bagian terpenting sejarah Alkitab, khususnya kehidupan Yesus; rangkuman isi buku-buku Alkitab; penafsiran dan penjelasan bagian-bagian Kitab Suci, terutama dari buku-buku sejarah Perjanjian Baru; prinsip-prinsip ilmu agama dan ajaran etika Kristen; ringkasan singkat mengenai Sejarah Gereja Kristen, khususnya Zaman Reformasi (*hervorming*) untuk menjelaskan asal-usul dan prinsip aliran Protestan; latihan praktis dalam memberi katekisasi dan khotbah. Perjanjian Lama diajarkan dengan sangat terbatas, tidak ada sejarah gereja dan sejarah zending. Katekismus dan naskah pengakuan iman tidak mendapat perhatian dalam kurikulum.²²

Peningkatan pendidikan teologi (yang sekaligus mendidik para guru agama Kristen) untuk mengantisipasi masa kemandirian gereja-gereja di Indonesia dan keinginan untuk memperjuangkan agar para teolog Kristen di Indonesia dapat sejajar dengan para cendekiawan di bidang lain, terlihat melalui berdirinya sejumlah

pendidikan teologi yang lebih tinggi di Indonesia. Pendidikan teologi ini merupakan pendidikan lanjutan bagi para lulusan sekolah guru 2 tahun dengan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Beberapa sekolah teologi yang bisa disebut di antaranya adalah *pendidikan teologi 6 tahun di Yogyakarta* yang dibuka oleh *Zending Gereformeerd* tahun 1925 di mana Dr. J.H. Bavinck dan Pdt. D. Baker mengajar sebagai dosen. Pendirian sekolah ini adalah atas usulan dari R.S. Nimpoeno, seorang keturunan Priyayi, yang memberi alasannya bahwa para lulusan dari sekolah guru tidak diterima dalam lingkungan yang lebih tinggi di Jawa karena pendidikan mereka terbatas. Lagi pula pendeta Eropa kurang cocok masuk ke dalam lingkungan itu. Kurikulum yang diberlakukan antara lain: pengetahuan tentang animisme, Hinduisme, Islam dan teosofi, serta membaca literatur dalam bahasa Belanda.²³

Di Malang, Jawa Timur dibuka *Bale Wijata* tahun 1927 untuk kepentingan gereja di Jawa Timur. Para mahasiswa pertamanya a.l. adalah: J. Mattheus Jr., Mardja Sir dan Drija Mestaka, yang setelah lulus menjadi dosen di sekolah tersebut. Kurikulumnya mencakup juga Bahasa Yunani dan Bahasa Inggris. Para dosennya di antaranya: Pdt. C.W. Nortier

²² *Ibid.*, 34-35.

²³ *Ibid.*, 114-115.

dan Dr. B.M. Schuurman. Pendidikan teologi di sini disesuaikan dengan pola pemikiran Jawa.²⁴

Pada tahun 1934, di Bogor didirikan Sekolah Teologi Tinggi (*Hoogere Theologische School*; HTS), yang kemudian pindah ke Jakarta pada tahun 1936, dan sekarang namanya adalah Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Berdirilah sekolah ini dirintis oleh Hendrik Kraemer, B.M. Schuurman dan Johannes Warneck. Sekolah ini bersifat oikumenis karena merupakan tanda bertumbuhnya persatuan antara berbagai organisasi zending, gereja yang muda dan Gereja Protestan. Pendidikan di sekolah ini juga sudah dipandang setara dengan pendidikan akademis di bidang hukum, ilmu kedokteran dan teknik. Lama pendidikan adalah 6 tahun (berdasarkan diploma MULO/SMP) dengan memberi perhatian pada perkembangan intelektual dan jiwa, sehingga sekolah ini menggunakan juga sistem pembinaan di asrama. Selama 2 tahun pertama, para tamatan MULO harus meningkatkan pengetahuan mereka sampai pada taraf AMS/SMA. Di sekolah ini, bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa pengantar dan dalam kurikulumnya dikembangkan *theologia in loco*. Mata pelajaran yang wajib diajarkan adalah

Bahasa Yunani dan Bahasa Ibrani.²⁵

c. Pendidikan Agama Kristen pada masa Kemerdekaan RI dan Seterusnya

Setelah Indonesia merdeka, telah banyak berdiri lembaga-lembaga pendidikan teologi di berbagai wilayah Indonesia²⁶, dan pendidikan agama Kristen dipahami sebagai bagian dari pendidikan teologi. Banyak terjadi perkembangan dalam pendidikan teologi. Di wilayah Indonesia bagian Timur, pada tahun 1948 Sinode GPM menetapkan bahwa untuk seterusnya tiap-tiap penghantar jemaat, apapun tingkat pendidikannya, memiliki wewenang yang sama dalam hal pelayanan Firman dan sakramen. Pada tahun 1960, mutu pendidikan teologi ditingkatkan menjadi Akademi Theologia (1960). Para calon pendeta diharapkan memiliki pengetahuan umum yang memungkinkan

²⁵ *Ibid.*, 118-120. Lihat juga Th. Van den End – J. Weitjens, *Op. Cit.*, 374-375.

²⁶ Beberapa lembaga pendidikan teologi di Indonesia setelah kemerdekaan RI adalah: STT Indonesia bagian Timur (STT INTIM) pada tahun 1948 di SoE (Timor) kemudian dipindahkan ke Makasar tahun 1953; Fakultas Teologi “Nommensen” di Pematangsiantar (1954), STT Duta Wacana di Yogyakarta (1962, sekarang menjadi Fak. Teologi UKDW); Akademi Theologia di Banjarmasin (1963; sekarang menjadi STT GKE Banjarmasin); STT Rantepao (1964); Fak. Teologi “Satya Wacana” di Salatiga (1965); Akademi Kristen “Wiyata Wacana” di Pati (1965); dan STT GKI Irja di Abepura (1965); STT Cipanas di Sindanglaya-Jabar (1967); Akademi Teologi GMIH di Ternate (1968); Akademi Teologi Kupang (1970; kini Fak. Teologi UKAW). Sejak tahun 1963 beberapa sekolah teologi bergabung dalam Perhimpunan Sekolah-sekolah Teologi di Indonesia (PERSETIA) (Th. Van den End – J. Weitjens, *Op. Cit.*, 375-376.

²⁴ *Ibid.*, 115-116.

mereka mengenal dan memahami soal-soal kemasyarakatan, dan memiliki ilmu teologi yang membuat mereka mampu menanggapi hal-hal itu secara teologis. Di Minahasa, pendidikan tinggi teologi tahun 1962 di Tomohon sebagai sebuah fakultas Universitas Kristen atau yang disebut Fak. Teologi UKI “Wenas.”

Di pulau Jawa, perkembangan pendidikan teologi terlihat juga di Sekolah Theologia Tinggi (HTS) yang berada di Jakarta. Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di kelas sudah diganti dengan bahasa Indonesia (1946). Kebanyakan dosennya adalah lulusan sekolah tersebut di mana P.D. Lautuihamallo diangkat sebagai dosen Indonesia yang pertama. Pada tahun 1954, nama Sekolah Theologia Tinggi diubah menjadi Sekolah Tinggi Theologia. Pada tahun 1958 sudah ada program studi lanjutan dan doktor pertama yang dihasilkan, yakni Fridolin Ukur.

Dalam kunjungannya ke Indonesia tahun 1951, C. Stanley Smith, utusan *Theological Education in South East Asia* (FTESEA), melaporkan bahwa kebanyakan sekolah di Indonesia adalah sekolah-sekolah Alkitab dengan standar akademis yang rendah. Dia melihat *Higher Theological College* [maksudnya Sekolah Tinggi Teologi Jakarta) adalah satu-satunya pendidikan teologi terbaik di Indonesia dan yang hampir dapat dibandingkan dengan *Nanking Theological Seminary* (NTS) di Cina dan seminari-seminari yang kuat di India. Standar akademis di *Higher Theological Seminary* mungkin dapat

disetarakan dengan gelar B.Th. (*Bachelor of Theology*) NTS. Akan tetapi, Smith melihat kurangnya profesor dan kurangnya literatur berbahasa Indonesia atau Cina di HTS.²⁷

Sebagaimana telah dikatakan di atas bahwa pendidikan agama Kristen dipandang hanya sebagai bagian dari pendidikan teologi, maka yang berperan paling besar dalam menjalankan pendidikan agama kepada orang-orang Kristen, baik di gereja maupun di sekolah-sekolah adalah para pendeta, meskipun secara praktis, pendeta tidak mengajar di Sekolah Minggu, melainkan dilakukan oleh Guru Jemaat atau Penatua. Guru-guru agama Kristen tetap hanya berfungsi sebagai pembantu pendeta. Sebagai contoh, Robert R. Boehlke mengatakan bahwa sebelum Perang Dunia II, guru biasa yang mengajar di Sekolah HKBP pun, tidak boleh memimpin kebaktian anak-anak atau Sekolah Minggu. Demikian pula dengan kurikulum Sekolah Minggu belum ada. Ibadah anak-anak diatur seperti tatacara ibadah orang dewasa. Boehlke menyimpulkan bahwa hampir satu abad lamanya sebelum kedatangan Elmer G. Homrighausen pada tahun 1955, tidak ada perubahan yang bermakna dalam pikiran dan praktik

²⁷ Samuel C. Pearson, *Supporting Asian Christianity's Transition from Mission to Church* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2010), 161-162.

pendidikan agama Kristen di Indonesia.²⁸

Boehlke berpendapat bahwa pendidikan agama Kristen di Indonesia mulai mengalami perubahan secara konseptual dan praktis melalui pengaruh Homrighausen. Dia menekankan pendekatan dialogis antara pendidikan, agama, dan karakter yang benar dari manusia. Melalui pendekatan ini, maka manusia harus memahami alasan ketaatannya kepada Tuhan dan alasan mengapa dia diciptakan dan dimaksudkan hidup. Homrighausen menolak pendekatan yang lebih menekankan ilmu jiwa dan ilmu pedagogik. Dia juga menolak baik teologi ortodoks yang kaku maupun teologi liberal. Dia berupaya untuk mempertemukan integritas intelektual dan agama Kristen. Seluruh bidang pendidikan agama perlu melakukan kajian yang cermat tentang kenyataan dunia, manusia, dan agama yang diajarkan.²⁹ Sejak saat ini, pendidikan agama Kristen mendapatkan perhatian yang lebih baik, yang tercermin melalui upaya-upaya penyusunan kurikulum baik di gereja maupun di sekolah-sekolah, serta upaya untuk merekrut para pengajar Pendidikan Agama Kristen yang berkualitas. Bagaimanapun, menurut penulis, perkembangan

pendidikan agama Kristen itu belum maksimal jika memperhatikan dan mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat pada masa kini. Jika dibandingkan dengan para ahli teologi, maka ahli PAK di Indonesia masih sangat kurang.

4. Analisis Historis

Dalam bagian ini, penulis menyoroti beberapa hal menyangkut pola pendidikan agama Kristen dalam sejarah Kekristenan di Indonesia, yakni: visi dan misi, tujuan, isi pembelajaran, tenaga pendidik, metode belajar, sumber belajar, sarana pembelajaran.

a. Visi dan misi

VOC tidak memiliki visi dan misi yang jelas sebagai lembaga yang mengemban amanat dari pemerintah Belanda untuk melakukan pekabaran Injil di mana di dalamnya tercakup juga upaya untuk menjalankan pendidikan agama Kristen. VOC lebih sering mengutamakan kepentingan perdagangan ketimbang pekabaran Injil atau pendidikan agama Kristen di daerah jajahannya. Demikian pula pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, pendidikan belum mendapatkan perhatian yang serius. Upaya pengembangan pendidikan agama Kristen justru lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga zending yang datang

²⁸ Robert R. Boehlke, *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan agama Kristen: Dari Yohanes Amos Comenius sampai Perkembangan PAK di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011, cet. ke-7), 769-770.

²⁹ *Ibid.*, 771-773.

dari Eropa. Pada masa kemerdekaan sampai pada saat ini, kelemahan ini masih terus ada. Padahal, visi dan misi sangat penting dimiliki oleh para penyelenggara pendidikan supaya dapat membuahkan hasil yang baik dan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Pendidikan agama Kristen tidak akan bisa maksimal membebaskan para peserta didiknya dari berbagai hal yang membelenggunya tanpa didasarkan pada visi dan misi yang jelas dan kuat. Visi adalah sesuatu yang diharapkan akan terwujud di masa depan, di suatu waktu yang telah ditentukan. Visi itu harus menjiwai semua orang yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Untuk mewujudkan visi itu, diperlukan misi, yakni upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut, yang terukur, dapat diverifikasi, dan dapat dievaluasi secara terus-menerus. Dalam penjabaran visi dan misi itulah, sebagaimana yang dikatakan W. Gulo, bahwa penyelenggara pendidikan agama Kristen mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal, serta berbagai kecenderungan yang dapat diantisipasi dalam pengembangan pendidikan³⁰.

Penyelenggaraan pendidikan tanpa

visi dan misi yang jelas dan kuat, serta dijiwai oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya, tidak akan menghasilkan kemajuan dan pembebasan terhadap berbagai hal yang mengikat para peserta didik, misalnya kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, dan sebagainya.

b. Fungsi Sekolah

Penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan agama Kristen pada masa VOC, masa kolonial Belanda, bahkan hingga masa kini, masih banyak dipandang sebagai tempat penanaman suatu pola ajaran tertentu kepada peserta didik. Berdasarkan percakapan informal dengan beberapa guru agama Kristen di Jakarta, penulis mendapati bahwa pendidikan agama Kristen yang mereka lakukan adalah bertujuan untuk menanamkan seperangkat ajaran tertentu kepada para peserta didik mereka. Pandangan bahwa sekolah adalah tempat penanaman ajaran-ajaran tertentu akan berakibat pada penerapan indoktrinasi, di mana metode hafalan merupakan andalan dalam proses pembelajaran. Darmaningtyas dalam bukunya, *Pendidikan yang Memiskinkan*, juga mencermati fungsi pendidikan semacam ini di Indonesia. Menurut dia, berdasarkan pendapat Ortego Y. Gasset yang dikutipnya, pendidikan adalah penyebaran

³⁰ W. Gulo, Penampakan Identitas dan Ciri Khas dalam Penyelenggaraan Sekolah Kristen dalam Weinata Sairin (peny.), *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan Kristen di Indonesia Antara Konseptual dan Operasional* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006, cet. ke-3), 95.

idea yang memungkinkan orang memilih antara yang ini dan yang itu, atau untuk hidup sedikit lebih baik.³¹ Seharusnya pendidikan agama membuat orang bukan hanya menjadi saleh dan taat pada hukum-hukum agama; bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga membuat orang aktif berefleksi tentang kehidupan yang riil sehingga mampu menghargai nilai-nilai kehidupan, bertanggungjawab, dan mampu berkontribusi positif pada kehidupan masyarakat.

c. Kurikulum

Ketersediaan kurikulum dan isi pembelajaran agama pada masa VOC, kolonial Belanda, dan pada masa kemerdekaan dan setelahnya, memperlihatkan ketidakseriusan menggumuli permasalahan pendidikan agama di Indonesia. Sejak awal, pendidikan agama Kristen selalu merupakan bagian dari pendidikan umum, dan selanjutnya pada masa kolonial Belanda hingga kini, kebanyakan pendidikan agama Kristen masih merupakan bagian dari pendidikan teologi. Walaupun pada masa sekarang sudah ada kesadaran bahwa pendidikan agama Kristen dan pendidikan teologi merupakan dua disiplin yang berbeda walaupun masih berhubungan erat satu sama lain, namun

masih tampak perhatian yang sangat kurang terhadap pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen.³²

Kelemahan kurikulum juga disebabkan oleh kurangnya tenaga pendidik agama Kristen dan kurangnya kesadaran dari para pendeta dan misionaris pada jaman VOC dan kolonial Belanda dalam mendewasakan atau memandirikan para guru agama Kristen. Pada masa itu, mereka diangkat dan ditempatkan sebagai pembantu pendeta, dan tidak pernah dipandang sebagai rekan sekerja yang setara. Isi kurikulum pun belum memperlihatkan keberpihakan pada masalah-masalah sosial di Indonesia.

Unsur-unsur pendukung yang lain, seperti tenaga pendidik, sumber belajar, sarana pendidikan, serta pembiayaan pendidikan yang sangat terbatas pada masa VOC hingga kini menyebabkan perkembangan pendidikan agama Kristen belum seperti yang diharapkan. Keterbatasan tersebut di atas menyebabkan peran pendidikan agama Kristen untuk membebaskan masih belum signifikan.

1. Penutup

Sebagai penutup, penulis mengemukakan beberapa pandangan dan

³¹ Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004), 27.

³² Bandingkan: Robert R. Boehlke, Pendidikan Agama Kristen sebagai Disiplin Ilmiah, dalam Andar Ismail (peny.), *Ajarlah Mereka Melakukan: Kumpulan Karangan Seputar Pendidikan Agama Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998), 37-68.

sikap yang harus dikembangkan dalam pendidikan agama Kristen masa kini, yaitu:

- Para pelaksana Pendidikan agama Kristen harus peka dengan konteks yang berkembang/ situasi riil yang sedang terjadi di lingkungannya, termasuk konteks MEA yang sedang kita bicarakan.
- PAK harus dibangun di atas dasar keberpihakan pada orang-orang yang tertindas, dan terbelenggu oleh kebodohan, ketidakadilan, dan kemiskinan. Karena itu, guru-guru PAK harus aktif mengembangkan pendidikan agama yang sesuai dengan konteks orang-orang tertindas yang sedang berlangsung di mana saja.
- PAK harus memperhatikan prinsip-prinsip pedagogis-teologis dengan terus bergerak maju untuk memenuhi fungsinya yang membebaskan (visi-misi yang jelas, tujuan, sasaran, profil

lulusan, kurikulum, sarana/prasarana, dana, dsb).

- Bagaimanapun situasinya para guru PAK haruslah orang-orang yang terpanggil di bidangnya di mana gerakannya tidak akan berhenti sekalipun belum didukung oleh fasilitas yang memadai.
- Pendidikan agama Kristen bukanlah bertujuan untuk mengkristenkan, tetapi memfasilitasi terjadinya perubahan kualitas keagamaan para peserta didik secara signifikan.
- Pendekatan pembelajaran seharusnya bukan bersifat indoktrinatif, melainkan memfasilitasi murid untuk memahami keyakinan yang diikutinya dalam tradisi tertentu dan memberi kebebasan kepadanya untuk memberikan penalaran yang rasional, yang kemudian menolong dia untuk berkomitmen pada keyakinannya terhadap nilai-nilai Kristiani.

Daftar Pustaka

- Aritonang, Jan Sihar. *Sejarah Pendidikan Teologi di Indonesia*. Makalah Seminar tanggal 9 Nopember 2010; Th. Van den End – J. Weitjens, *Ragi Carita 2*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- Boehlke, Robert R. *Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan agama Kristen: Dari Yohanes Amos Comenius sampai Perkembangan PAK di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011, cet. ke-7.
- Chandra, Robby I. *Pendidikan Menuju Manusia Mandiri*. Bandung: Generasi Infomedia, 2006.
- Darmaningtyas. *Pendidikan yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Press, 2004.
- Enklaar, I.H. dan E.G. Homrighausen. *Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009, cet. ke-22.
- Hendropuspito, D.C. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 2006, cet. ke-22.
- Hoekema, A.G. *Berpikir Dalam Keseimbangan yang Dinamis: Sejarah lahirnya Teologi Protestan Nasional di Indonesia (Sekitar 1860-1960)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- Ismail, Andar. *Ajarlah Mereka Melakukan: Kumpulan Karangan Seputar Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998.
- Kroeskamp, H. *Early Schoolmasters in a Developing Country: A History of Experiments in School Education in 19th Century Indonesia*. Assen, The Netherlands: Van Gorcum & Comp. B.V., 1974.
- Livingston, James C. & Francis Schüssler Fiorenza. *Modern Christian Thought: The Twentieth Century Volum 2*. Minneapolis: Fortress Press, 2006.
- Pazmino, Robert W. *Foundational Issues in Christian Education: An Introduction in Evangelical Perspective*. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 2001.
- Pearson, Samuel C. *Supporting Asian Christianity's Transition from Mission to Church*. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2010.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Bab I Pasal 1 ayat 1.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Bab II Pasal 6.
- Randwijck, S.C. Graaf van. *Oegstgeest: Kebijaksanaan Lembaga-lembaga Pekabaran Injil yang Bekerjasama 1897-1942*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989.
- Sairin, Weinata (peny.). *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan Kristen di Indonesia Antara Konseptual dan Operasional*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006, cet. ke-3.

Sidjabat, B. Samuel. *Strategi Pendidikan Kristen*. Yogyakarta: Yayasan ANDI, cet. ke-7, 1999.

UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab IV pasal 13-32.